

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materil, spiritual, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat di laksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah dalam Pembangunan Nasional merupakan hal yang sangat vital dan mendasar sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 dalam paragraf ke dua dengan tujuan memberikan kesejahteraan. Dengan kata lain pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata, baik materiil maupun spiritual.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya selalu di mulai dari kondisi riil di masyarakat hal ini mengingat esensi dari pemberdayaan adalah pentingnya kesadaran terhadap sejumlah masalah yang berada di sekitarnya (Zaenal Mukarrom 2017 : 80).

Salah satu upaya peningkat <sup>1</sup> hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah dengan pemberdayaan, dalam pemberdayaan harus

menggunakan pola pemberdayaan yang tepat sasaran dengan bentuk yang tepat serta memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha.

Mencapai itu semua maka pintu gerbang utama untuk masuk ke dalam ranah cita-cita tersebut melalui pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan keberdayaan kesejahteraan sosial serta penggalan potensi diri masyarakat untuk bisa menciptakan wirausaha baru dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Kesejahteraan sosial tercermin dengan meningkatnya pendapatan keluarga dalam artian tidak dalam golongan (kemiskinan). Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. (Soemitro Remi dan Tjiptoherijanto, 2016:27).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 10. 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga,

kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masalah yang menghambat seseorang untuk melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Penanganan masalah pemberdayaan PMKS perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan suatu kebutuhan bagi upaya penyelesaian masalah kehidupan masyarakat mulai dari masalah kemiskinan sampai masalah kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep merupakan suatu unsur perangkat daerah dalam bidang sosial yang menangani masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti Pemberdayaan PMKS, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun Pemberdayaan Disabilitas serta Pemberdayaan Lanjut Usia dan Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM).

Jumlah PMKS yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, sebagaimana berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**Tahun 2023**

No	Tahun	PMKN	Ditangani (%)
1	2018	82	77
2	2019	78	78
3	2020	65	80
4	2021	70	83
5	2022	64	88

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, 2023

Pemberdayaan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep melalui 2 bidang yaitu Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Dalam pemberdayaan kepada PMKS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep memberikan sarana dan prasana kewirausahaan dan memberikan bantuan modal usaha maupun memberikan pendampingan untuk bisa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sebagaimana terlihat tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Program dan Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan Tahun 2021	Sasaran (orang)	Unit Cost (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Bansos Berupa Uang			
	1. Pembinaan dan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas	20	1.500.000	30.000.000
	2. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat	30	3.600.000	108.000.000
	3. Pemberdayaan Keluarga Miskin	45	1.000.000	45.000.000
	4. Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni	257	15.000.000	3.855.000.000

	5. Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi Bagi Lanjut Usia	33	1.500.000	49.500.000
	6. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	90	3.000.000	270.000.000
II	Bansos Berupa Barang			
	1 Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	60	350.000	21.000.000
	2 Bhakti Sosial dan Sosialisasi TP. PKK	290	150.000	43.500.000
No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Sasaran (orang)	Unit Cost (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Bansos Berupa Uang			
	1. Pembinaan dan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas	10	1.000.000	10.000.000
	2. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat	30	3.000.000	90.000.000
	3. Pemberdayaan Keluarga Miskin	30	1.000.000	30.000.000
	4. Bhakti Sosial dan Sosialisasi Bersama TP. PKK	50	2.500.000	125.000.000
	5. Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni	243	15.000.000	3.645.000.000
	6. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	100	3.000.000	300.000.000
II	Bansos Berupa Barang			
	1. Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi Bagi Lanjut Usia	60	450.000	27.000.000
	2. Pembinaan dan Peningkatan Tuna Sosial	5	450.000	2.250.000
	3. Pembinaan dan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas	25	3.000.000	75.000.000

**Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, 2023**

Lebih dari 10 kegiatan pelayanan penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di Kabupaten Sumenep yang dikelola parsial, sektoral, fragmentaris yang belum maksimal dirasakan manfaatnya secara parsial, karena penerima manfaat terkadang keluarga dekat dengan Kepala Desa atau pendukung Kepala Desa, sedangkan masyarakat biasa seakan kurang bisa ada

tempat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial, kalau tidak ada yang membawanya. (Sumber : Dinsos Kab. Sumenep)

Prakteknya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep memberikan Standart Pelayanan Minimum terkait masalah-masalah kesejahteraan sosial, membantu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu keluarga fakir miskin, anak jalanan, tuna asusila, gelandangan, anak terlantar, dan disabilitas, keluarga berumah tidak layak huni dan beberapa masalah-masalah sosial lainnya. (Interview dengan Bapak Fajar Kabid, 06 November 2023, di ruang kerjanya).

Adapun hambatan dalam pemberdayaan PMKS, sulitnya dalam pendataan sasaran, terutama para gelandangan dan anak jalanan atau anak terlantar, diberi pembinaan dan bantuan, setelah itu mereka kembali lagi menjadi PMKS, dengan alasan bantuan yang diberikan kurang cukup dalam menghidupi dirinya sendiri. Selain itu para anak jalan atau terlantar, mereka dengan kehidupan yang bebas, walaupun telah dilakukan pembinaan dan rehabilitasi mental, namun mereka kembali dalam kehidupan yang bebas.

Berdasarkan observasi awal di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, telah melakukan program dan kegiatan dengan pemberdayaan PMKS dengan diberi bantuan sosial berupa uang tunai maupun barang, akan tetapi masih banyak lagi PMKS yang masih kena razia, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep, kembali lagi memberikan arahan dan motivasi hidup untuk kembali lagi pada kehidupan yang layak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lebih serius melalui pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan hak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan ini dimaksudkan agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperoleh kesejahteraan sosial yang lebih baik yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Dengan kata lain pemberdayaan (*empowering*) adalah menciptakan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu saja melainkan juga pranata-pranatanya.

Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mengangkat sebuah judul **“Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kabupaten Sumenep (Studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Pemberdayaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, antara lain :

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Kecamatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS yang telah dilakukan untuk menuju pada kesejahteraan hidup

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan, pengalaman, kreatifitas serta kesempatan untuk dapat menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh diberbagai kegiatan perkuliahan ke dalam obyek yang sebenarnya di lapangan. Dapat memperluas wawasan dan menambah

kepustakaan dalam meneliti objek yang sejenis, sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih sempurna.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat gambaran awal dari susunan penelitian ini, perlu penulis menyusun sistematika penulisan yang menunjukkan susunan bab dan bab, sehingga dapat dilihat rangkaian penelitian yang sistematis.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian, yang berisi fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data serta keabsahan data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumenep.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumenep.

#### BAB VI: PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

